

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Secara umum, pembangunan ekonomi merupakan rangkaian usaha perekonomian dalam mengembangkan kegiatan ekonominya seperti, penyediaan infrastruktur yang lebih banyak, perusahaan yang berkembang, peningkatan mutu pendidikan, serta teknologi yang semakin maju dan berkembang, hal itu menjadi arti penting dalam sebuah proses pembangunan ekonomi (Anggraini et al., 2020). Dalam kemajuan ekonomi, kualitas SDM selalu menjadi sebuah pemangku pengembangan, maka dari itu jumlah populasi masyarakat suatu negara merupakan faktor utama dalam pembangunan suatu ekonomi. Ketika jumlah populasi masyarakat terlalu banyak, maka proporsional dengan tersedianya kesempatan kerja, maka beberapa masyarakat pada usia kerja tidak mendapat dapat perolehan pekerjaan, sehingga terjadi tingginya persentase pengangguran.

Indeks kesuksesan kemajuan ekonomi suatu negara dapat dinilai dari pertumbuhan ekonomi, jumlah pengangguran, dan jumlah pekerja yang terserap, serta dapat menunjang proses pembangunan negara berkembang dan menciptakan pemerataan pembangunan yang adil (Ardiansyah et al. 2023). Indeks kesuksesan pada pembangunan ekonomi ini diharapkan dapat meningkatkan kualitas hidup masyarakat, memberikan lapangan pekerjaan untuk masyarakat dan membantu kesejahteraan negara dengan menghasilkan pendapatan yang adil kepada masyarakat.

Negara berkembang termasuk negara Indonesia masih dibutuhkannya pada pengembangan ekonomi sebagai bagian dari pembangunan nasional. Pada proses pembangunan ekonomi, negara Indonesia memiliki beberapa masalah, tiga permasalahan yang mendominasi yaitu permasalahan kependudukan, permasalahan ketenagakerjaan, dan juga permasalahan pengangguran. Menurut pengelolaan statistik (BPS), jumlah populasi di Indonesia senilai 270,2 juta jiwa di tahun 2020, dan tetap menjadikan Indonesia dengan jumlah populasi kependudukan terbanyak posisi 4 dalam dunia sesudah Tiongkok, India, dan Amerika Serikat. Permasalahan pada kependudukan di Indonesia ini disebabkan oleh jumlah populasi yang banyak ditambah laju eskalasi yang relatif pesat dan penyebaran penduduk tidak merata (Purwasih & Soesaty, 2017).

Lalu, permasalahan lainnya ialah ketenagakerjaan, yang sering dihadapi negara Indonesia di masa lalu, namun belum terselesaikan dalam hal penyerapan tenaga kerja, karena jumlah angkatan kerja yang meningkat setiap tahunnya tidak sebanding dengan kapasitas kesempatan kerja yang tersedia. Ketika angkatan kerja meningkat dari tahun ke tahun, membuat Indonesia terjebak dalam permasalahan ketenagakerjaan dikarenakan adanya batasan kapasitas perekonomian dalam meresap sumber daya baru. Akibat perkembangan populasi, menjadikan jumlah orang yang bekerja menjadi semakin bertambah dan jumlah pencari kerja juga semakin bertambah. Maka dari itu, perkembangan populasi seharusnya dibarengi dengan jumlah pekerja terserap untuk bisa mempunyai *impact* pada penurunan pekerja.

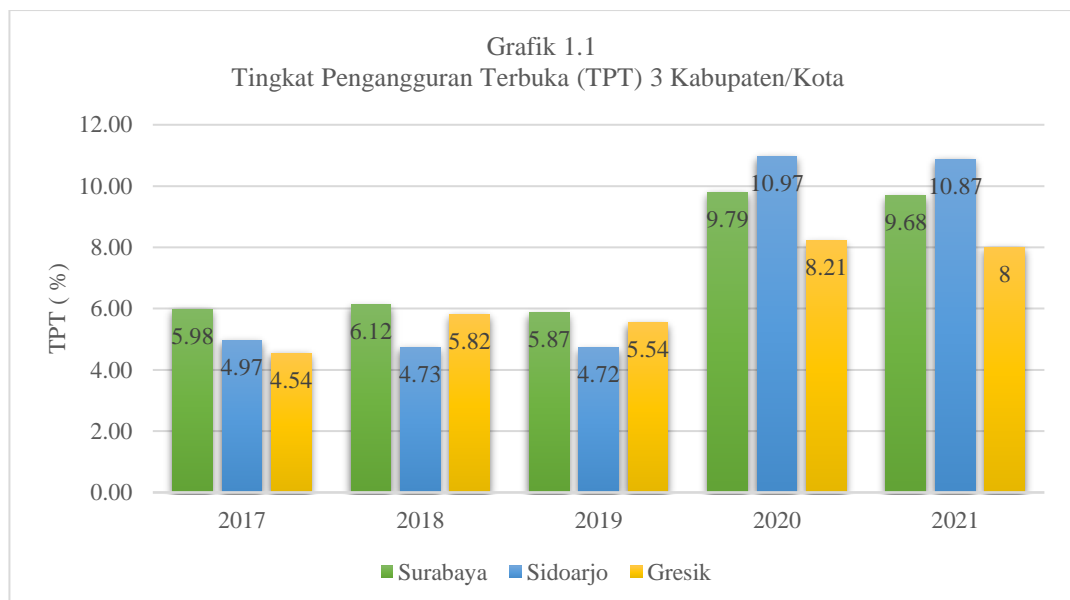
Pada publikasi Badan Pusat Statistik (BPS) Provinsi Jawa Timur menyatakan bahwa jumlah pekerja yang terserap pada Provinsi Jawa Timur cenderung mengalami peningkatan dalam periode lima tahun akhir. Sekitar 19.114.563 jiwa jumlah orang yang bekerja di tahun 2016. Kemudian meningkat sekitar 20.099.220 jiwa di tahun 2017. Lalu meningkat sekitar 20.449.949 jiwa di tahun 2018. Meningkat juga pada tahun 2019 sekitar 20.655.632 jiwa dan terakhir pada tahun 2020 juga meningkat sekitar 20.962.967 jiwa. Hal tersebut memiliki arti bahwasanya jumlah orang yang bekerja terus mengalami kenaikan dalam periode lima tahun terakhir.

Kenaikan jumlah populasi orang bekerja skala besar tidak dibarengi dengan lapangan kerja yang tersedia yang mengakibatkan peningkatan pada pengangguran (Nurrohman & Arifin, 2010). Dalam teori kependudukannya, Malthus menjelaskan bahwasanya tingginya tingkat angkatan kerja menciptakan ketidakseimbangan dengan lapangan kerja yang tersedia sehingga menyebabkan banyaknya pengangguran. Dengan latar belakang tersebut menjadikannya timbul suatu permasalahan pada jumlah pekerja yang diserap belum optimal.

Provinsi Jawa Timur memiliki daerah yang banyak kawasan industri dimana disebut dengan kawasan Gerbang Kertosusila, daerah-daerah yang memiliki banyak kawasan industri tersebut harusnya dapat meminimalisir tingkat pengangguran karena daerah industri mesti menyediakan lapangan pekerjaan, namun disamping itu daerah tersebut juga banyak dipadati oleh penduduk baik dari luar daerah maupun penduduk asli daerah.

Persentase tingkat pengangguran terbuka dalam wilayah Gerbang Kertosusila terdapat 3 Kabupaten/Kota, yakni Kabupaten Gresik, Kota Surabaya serta Kabupaten Sidoarjo dimana memiliki banyak kawasan industri besar untuk dijadikan sebagai wilayah pembanding tingkat pengangguran terbuka tertinggi pada tahun 2017-2021.

Grafik 1.1
Persentase Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) Menurut 3
Kabupaten/Kota Wilayah Gerbang Kertosusila Tahun 2017-2021



(Sumber : BPS Provinsi Jawa Timur, 2021)

Dalam grafik diatas menunjukkan bahwa dalam 3 Kabupaten/Kota di wilayah Gerbang Kertosusila yang dijadikan sebagai daerah pembanding tingkat pengangguran tertinggi disamping memiliki kawasan industri besar yang mana wilayahnya mendapati persentase tingkat pengangguran terbuka yang cukup tinggi adalah Kabupaten Sidoarjo yang mana pada tahun 2019 turun sebesar 4,72%, kemudian meningkat drastis pada tahun 2020 sebesar 10,97% dikarenakan dampak Covid-19, banyak pekerja PHK (Putus Hubungan Kerja) terhadap perusahaan-perusahaan, lalu pada tahun 2021 pulih namun tidak

signifikan yang dimana mengalami penurunan sebesar 10,87% hanya turun 10 persen dari tahun 2020.

Kabupaten Sidoarjo merupakan Kabupaten yang menduduki peringkat kedua dengan tingkat populasi penduduk terbanyak di wilayah Gerbang Kertosusila (Yuniarti & Imaningsih, 2022). Badan Pusat Statistik Kabupaten Sidoarjo menyatakan bahwa, tahun 2020 populasi Kabupaten Sidoarjo sejumlah bekisar 2.282.215 jiwa didampingi jumlah angkatan kerja 1,19 juta jiwa. Tingginya jumlah populasi tersebut menjadikan masalah di Kabupaten Sidoarjo, diantaranya ialah pengangguran dan penyerapan tenaga kerja. Dalam grafik 1.1 telah disinggung bahwa persentase pengangguran terbuka tertinggi berada pada Kabupaten Sidoarjo dimana pada tahun 2020 memiliki Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) senilai 10,97% dan menurun di tahun 2021 sebesar 10,87%. Meskipun menurun namun persentase itu masih dikatakan tinggi ketika dibanding dengan wilayah sama seperti Kota Surabaya dan Kabupaten Gresik.

Kemudian terkait problematik yang belum usai hingga kini ialah mengenai belum maksimalnya jumlah tenaga yang terserap yang mana penyerapan tenaga kerja sendiri menjadikan fokus permasalahan dalam lingkup sosial-ekonomi. Penyerapan tenaga kerja memiliki dua sudut pandang yang berbeda dalam sebuah teori yakni teori klasik dan teori keynes. Dari pandangan teori klasik menjelaskan bahwa tingkat produksi dan keseimbangan harga bisa tercapai ketika perekonomian berposisi pada tingkat kesempatan kerja penuh. Di sisi lain, stabilitas jumlah tenaga kerja yang terserap penuh cuma dapat dicapai melewati pengoperasian instrumen pasar bebas (Dayuh, 2013).

Perspektif yang berbeda dari teori klasik. Menurut Keynes, aktivitas perekonomian bergantung pada aspek permintaan. Artinya, hal ini bergantung pada jumlah total pengeluaran yang dilaksanakan perekonomian dalam periode yang ditentukan. Total pengeluaran merupakan jumlah yang dikeluarkan sebagai pembelian barang dan jasa untuk diproduksi pada perekonomian selama waktu ditentukan dan cuma dapat diestimasi pada tahun tertentu (Mahendra, S., & Arka, S. 2021).

Kemudian dalam definisi penyerapan tenaga kerja sendiri ialah jumlah pekerja yang diserap untuk melakukan pekerjaan dalam suatu institut usaha tertentu. Keadaan pasar tenaga kerja di Kabupaten Sidoarjo dimana daerahnya terkenal banyak kawasan sektor industri dan jasa. Sehingga dapat mengakibatkan bertambahnya penduduk baik penduduk Kabupaten Sidoarjo atau penduduk urbanisasi untuk mencari pekerjaan, hal tersebut mengakibatkan kenaikan jumlah tingkatan bekerja secara tidak langsung mewajibkan pemerintah dalam memperbanyak lapangan kerja di Kabupaten Sidoarjo.

Tabel 1.1

**Penduduk Usia Kerja, Angkatan Kerja dan TPAK Kabupaten Sidoarjo
Tahun 2017-2021**

| Tahun | Penduduk Usia Kerja (Juta Jiwa) | Angkatan Kerja (Juta Jiwa) | TPAK (%) |
|--------------|--|-----------------------------------|-----------------|
| 2017 | 1.666.227 | 1.075.359 | 64.54 |
| 2018 | 1.696.290 | 1.094.650 | 64.53 |
| 2019 | 1.726.393 | 1.153.532 | 66.82 |
| 2020 | 1.783.770 | 1.198.236 | 67.17 |
| 2021 | 1.813.189 | 1.205.169 | 66.47 |

(Sumber : BPS Kabupaten Sidoarjo, 2021)

Pada publikasi Badan Pusat Statistik (BPS) di Kabupaten Sidoarjo menunjukkan pada tabel 1.1 jumlah angkatan kerja dan penduduk usia kerja pada Kabupaten Sidoarjo cenderung meningkat. Dimana penduduk usia kerja ialah penduduk yang usianya lebih dari 15 tahun, memiliki pemerataan penduduk usia kerja di tahun 2021 sebesar 1,81 juta jiwa, naik menjadi 29,42 ribu jiwa jika dibanding pada tahun 2020. Penduduk usia kerja naik tiap tahunnya beriringan dengan kenaikan jumlah populasinya. Dari total penduduk usia kerja pada 2021 tersebut, 1,20 juta jiwa antara lain ialah angkatan kerja. Jumlah angkatan kerja pada 2021 di Sidoarjo mengalami kenaikan 0,58 persen atau sebanyak 6,93 ribu jiwa dibanding tahun 2020.

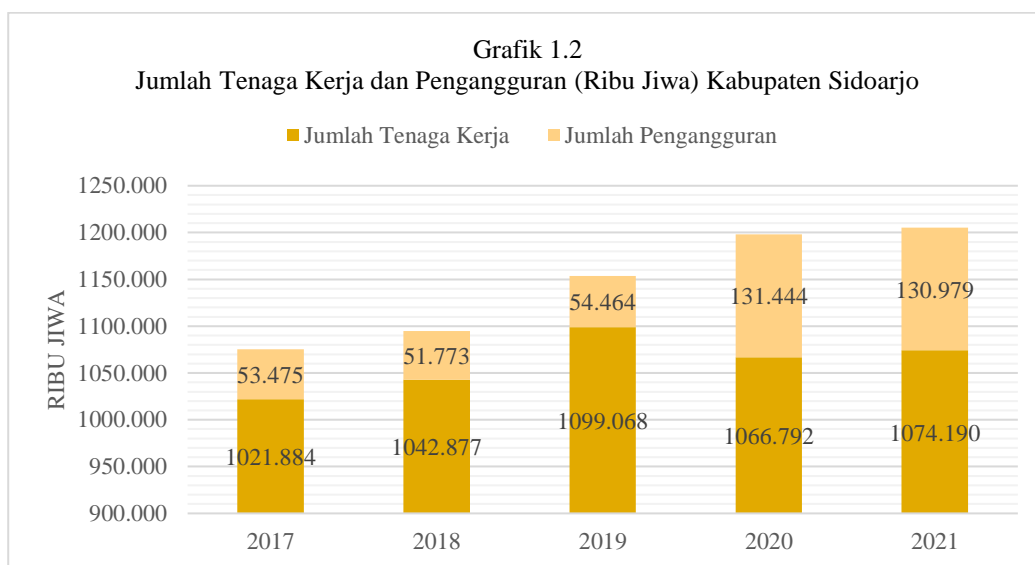
Komponen pembentuk angkatan kerja ialah pekerja dan pengangguran. Pada tahun 2021 sebanyak 1,07 juta jiwa penduduk di Sidoarjo bekerja sedangkan sebanyak 130,98 ribu jiwa tidak bekerja (pengangguran). Peningkatan jumlah tenaga kerja di Kabupaten Sidoarjo tidak diikuti dengan kenaikan Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK). Pada tahun 2021 sebesar 66,47%, turun 0,71% daripada tahun sebelumnya. Menurunnya persentase TPAK terjadi karena adanya peningkatan terhadap banyakan pekerja yang memiliki indikasi pertambahan kuantitas angkatan kerja yang lebih tinggi melebihi kemampuan pasar dalam menyerap pekerja. Meningkatnya jumlah pekerja disebabkan dengan adanya kemunculan jumlah populasi angkatan kerja baru.

Pertambahan jumlah angkatan kerja yang semakin meningkat ini membuat jumlah pekerja yang diserap di Kabupaten Sidoarjo ini belum maksimal karena kendala yang ada pada tumbuhnya angkatan kerja baru yang muncul membuat

jumlah pengangguran juga mengalami peningkatan. Keadaan ketenagakerjaan inilah yang membuat Kabupaten Sidoarjo masih belum bisa teratasi. Pada grafik 1.2 ialah kondisi ketenagakerjaan di Kabupaten Sidoarjo dimana jumlah tenaga kerja mengalami fluktuatif dan jumlah pengangguran juga terus mengalami peningkatan meski pada tahun 2021 turun, tetapi angka tersebut masih dikatakan tinggi.

Grafik 1.2

Kondisi Ketenagakerjaan Kabupaten Sidoarjo (Ribu Jiwa) Tahun 2017-2021



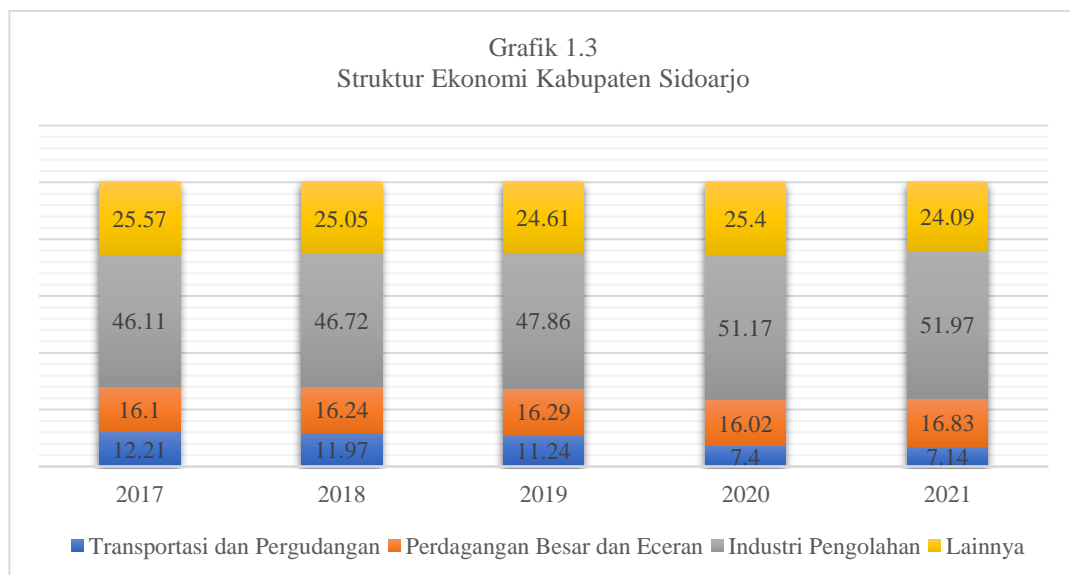
(Sumber : BPS Kabupaten Sidoarjo, 2022)

Penyerapan tenaga kerja juga bisa dipengaruhi oleh beberapa aspek, yakni pertumbuhan ekonomi, investasi dalam negeri, dan upah minimum yang ditentukan oleh pemerintah. Perubahan aspek-aspek tersebut bisa memengaruhi tingkatan beban kerja. Masuknya jumlah tenaga kerja dalam jumlah besar memberikan kesempatan untuk masyarakat dalam melaksanakan kegiatan ekonomi untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Aspek utama dalam pengaruh penyerapan tenaga kerja ialah pertumbuhan ekonomi.

Persentase pertumbuhan ekonomi suatu daerah yang tinggi diwakili juga oleh nilai PDRB yang tinggi. Kabupaten Sidoarjo memiliki sejumlah sektor industri yang struktur sektor usahanya tidak mengalami perubahan menonjol pada produk domestik bruto daerah (PDRB) dari sektor yang mendominasi perekonomian Kabupaten Sidoarjo yaitu industri pengolahan selama lima tahun terakhir (2017-2021). Sektor usaha manufaktur tersebut menjadi sektor utama. Jika digambarkan dalam sebuah grafik seperti dibawah ini.

Grafik 1.3

Persentase Struktur Ekonomi Kabupaten Sidoarjo Tahun 2017-2021



(Sumber : BPS Kabupaten Sidoarjo, 2021)

Menurut kajian Badan Pusat Statistik Kabupaten Sidoarjo mengidentifikasi bahwasanya kesempatan kerja sektor industri pengolahan menjadi peran utama dalam perekonomian Kabupaten Sidoarjo dengan nilai kontribusi yang terus meningkat setiap tahunnya dimana industri pengolahan berperan sekitar 51,97% pada perekonomian Kabupaten Sidoarjo pada tahun 2021. Sektor usaha perdagangan besar dan eceran, termasuk reparasi mobil dan sepeda motor, berperan senilai 16,83% pada perekonomian Kabupaten

Sidoarjo pada tahun 2021. Sektor usaha lain, yang terdiri atas sebagian penggabungan sektor usaha dengan peranan tiap-tiap dibawah 10%, berperan senilai 24,09% kurun tahun 2021 secara berkelanjutan, sedangkan sektor usaha transportasi dan pergudangan berperan sekitar 7,14% pada perekonomian Kabupaten Sidoarjo pada tahun 2021.

Pada tahun 2021, sektor usaha industri pengolahan menjadikan barang dan jasa dengan biaya tertinggi sebesar 109,462 triliun rupiah, diikuti oleh sektor usaha perdagangan besar dan eceran, termasuk reparasi mobil dan sepeda motor, yang menghasilkan barang dan jasa sebesar 35,456 triliun rupiah. Di sisi lain, sektor pertambangan, penggalian, dan pengadaan air, serta pengelolaan sampah, limbah, dan daur ulang adalah sektor usaha yang menghasilkan barang dan jasa dengan nilai terkecil yakni secara berurutan sebesar 134,92 milyar rupiah dan 139,82 milyar rupiah.

Kemudian pada grafik 1.3 menyatakan bahwasanya sektor usaha industri pengolahan dan perdagangan besar dan eceran, reparasi mobil dan sepeda motor, mengalami peningkatan nilai produksi riil senilai 3,55 triliun rupiah dan 1,99 triliun rupiah, berkontribusi pada kenaikan persentase dari laju pertumbuhan ekonomi pada Kabupaten Sidoarjo di tahun 2021, meskipun pertumbuhan ekonomi di Kabupaten Sidoarjo fluktuatif tetapi masih arah positif dalam mendorong kenaikan setiap sektor usahanya sebelum munculnya pandemi. Namun, dalam sisi lain persentase tingkat pengangguran terus mengalami kenaikan. Selanjutnya terdapat pertumbuhan ekonomi yang menjadi variabel penelitian yang dapat dijelaskan sebagai berikut.

Grafik 1.4**Persentase Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Sidoarjo Tahun 2017-2021**

(Sumber : BPS Kabupaten Sidoarjo, 2021)

Persentase pada laju pertumbuhan ekonomi Kabupaten Sidoarjo menghadapi fluktuatif dimulai tahun 2017 sampai 2021 yang dapat dilihat pada grafik 1.4. Pada tahun 2021, perekonomian di Kabupaten Sidoarjo tumbuh sebesar 4,21% yang mana menunjukkan kenaikan senilai 7,9% dibanding pada periode tahun sebelum ini, yang mendapati kontraksi hingga 3,69% karena COVID-19. Banyak lapangan usaha tumbuh dua kali lipat selama tahun 2021, dari hanya 7 sektor usaha menjadi 14 sektor usaha.

Menurut Pertumbuhan Ekonomi Harrod-Domar dalam teori ekonomi klasik, menyatakan bahwasanya kunci dari pertumbuhan ekonomi yang meningkat perlu dorongan nilai investasi yang positif sebagai sumber pembentukan modal seperti tabungan dalam negeri (Asrinda, D., & Setiawati, R. 2022). Selanjutnya, dalam riset yang dikerjakan oleh Sabihi et al., 2021 dimana hasil risetnya menerangkan bahwasanya pertumbuhan ekonomi mempunyai pengaruh baik terhadap penyerapan tenaga kerja, perihal tersebut menjelaskan jika terdapat peningkatan angka PDRB di tiap sektor usaha

perekonomian yang akibatnya bisa mendukung kenaikan penyerapan terhadap jumlah orang bekerja.

Dari penyumbang pertumbuhan ekonomi tertinggi terdapat pada sektor usaha manufaktur (industri pengolahan) dan sektor jasa (perdagangan besar dan eceran). Berdasarkan pada publikasi Dinas Perindustrian dan Perdagangan dalam pengklasifikasiannya bahwa jumlah industri di Kabupaten Sidoarjo memiliki jumlah terbanyak pada industri kecil dan menengah. Berikut tabel dari jumlah industri pada Kabupaten Sidoarjo dalam 5 tahun (2017-2021).

Tabel 1.2

Jumlah Unit Usaha Kabupaten Sidoarjo tahun 2017-2021

| Tahun | Industri Kecil | Industri Menengah | Industri Besar | Total |
|--------------|-----------------------|--------------------------|-----------------------|--------------|
| 2017 | 14.289 | 2.234 | 368 | 16.891 |
| 2018 | 14.313 | 2.260 | 368 | 16.941 |
| 2019 | 14.421 | 2.284 | 368 | 17.073 |
| 2020 | 14.468 | 2.323 | 368 | 17.159 |
| 2021 | 14.468 | 2.381 | 368 | 17.217 |

(Sumber : Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Sidoarjo, 2022)

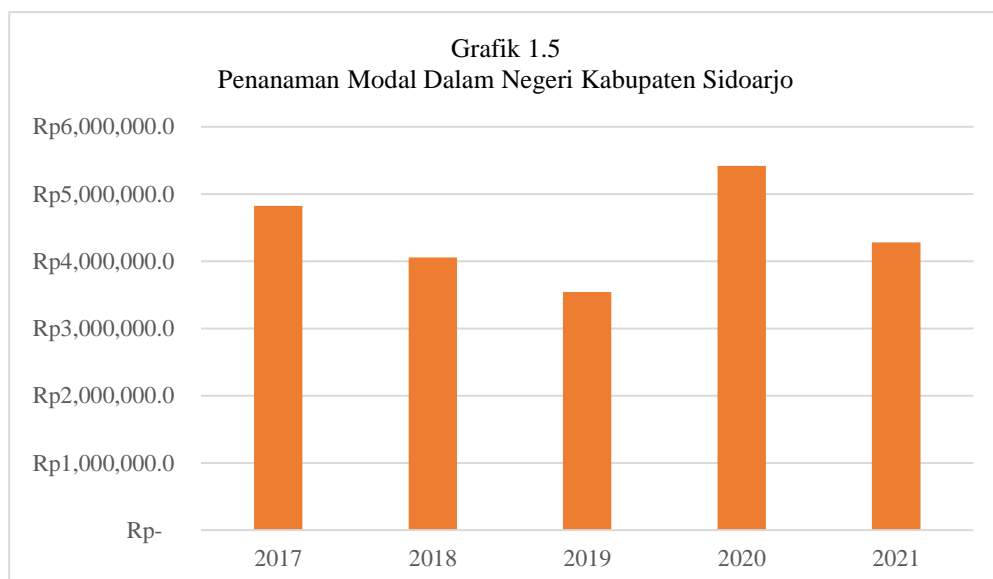
Berdasar pada tabel diatas diketahui bahwasanya industri kecil dan menengah memiliki jumlah terbanyak. Selain dari pertumbuhan ekonomi, investasi juga merupakan aspek lain yang bisa memengaruhi penyerapan tenaga kerja. Dalam penelitian ini menggunakan variabel investasi domestik (PMDN) dimana kegiatan penanaman modal dalam negeri dengan investor perorangan maupun badan usaha yang ada di dalam negeri yang tujuannya untuk membangun usaha menggunakan modal dalam negeri. Pemerintah berusaha menciptakan lingkungan yang memajukan investasi dalam mengupayakan kenaikan terhadap perekonomian (Liana et al., 2020).

Kabupaten Sidoarjo memiliki jumlah industri yang dominan pada industri kecil dan menengah dibanding industri besarnya. Pada penanaman modal dalam negeri dalam pengklasifikasian industrinya terletak pada industri kecil dan menengahnya. Investasi bisa dinyatakan sebagai aktivitas yang mana modal yang akan diinvestasikan dalam 1 atau lebih dari sebuah properti dalam waktu yang disesuaikan dengan mengharap guna mendapatkan penghasilan ataupun kenaikan nilai modal (Silfiana et al. 2023).

Dalam permasalahannya, investasi domestik juga memiliki pengaruh dalam penciptaan lapangan usaha baru dengan IKM. Tumbuhnya barang modal juga mendorong kenaikan pada jumlah barang dan jasa di masa yang akan datang (Bumi et al., 2019). Realisasi investasi di Kabupaten Sidoarjo menunjukkan bahwasanya penanaman modal dalam negeri (PMDN) lebih berkontribusi dikarenakan adanya dukungan dari banyaknya industri kecil dan menengah.

Grafik 1.5

Nilai Investasi Domestik di Kabupaten Sidoarjo Tahun 2017- 2021



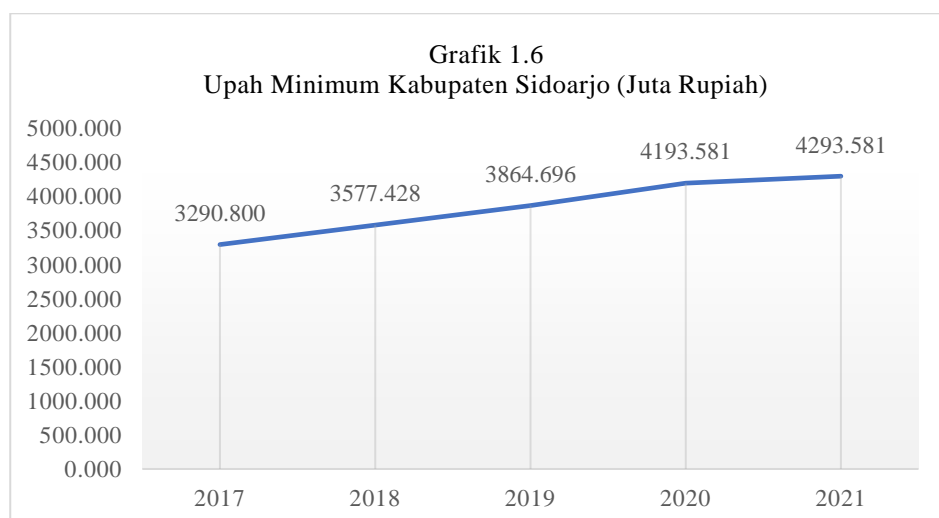
(Sumber : DPMPTSP, 2022)

Selanjutnya terdapat nilai realisasi nilai investasi domestik (PMDN) di Kabupaten Sidoarjo yang ditunjukkan pada grafik 1.5 tahun 2017-2021 dimana nilai realisasi investasi PMDN mengalami fluktuatif. Penanaman modal dalam negeri memiliki klasifikasi industri pada industri kecil dan menengah. Kabupaten Sidoarjo memiliki kontribusi besar terhadap pembangunan infrastruktur untuk menyediakan lapangan kerja baru di lingkup program padat karya guna menyeimbangkan penyerapan tenaga kerja di Kabupaten Sidoarjo. Hasil riset yang dilakukan oleh Annisa Yulianti, 2021 bertolak belakang yakni investasi PMDN memiliki pengaruh negatif signifikan terhadap penyerapan tenaga kerja. Hal ini diketahui bahwa semakin tinggi tingkat investasi maka tidak banyak tenaga kerja yang terserap.

Kemudian terdapat faktor lain yakni upah minimum dapat memengaruhi penyerapan tenaga kerja. Upah sebagai imbalan yang wajib diberikan produsen atau perusahaan kepada para pekerja sebagai imbalan atas upaya yang dilakukan (Wihastuti & Rahmatullah, 2018).

Grafik 1.6

Upah Minimum (Juta Rupiah) Kabupaten Sidoarjo Tahun 2017-2021



(Sumber : BPS Kabupaten Sidoarjo, 2021)

Penggunaan upah minimum adalah pengupayaan dalam mengembangkan upah perkapita tenaga kerja sehingga tingkatan upah rata-rata pekerja juga naik. Hal tersebut dilakukan karena teori klasik menyatakan bahwasanya kenaikan upah mendorong pertumbuhan penduduk, yang pada gilirannya menghasilkan peningkatan permintaan akan makanan, yang pada gilirannya mendorong produsen dalam menaikkan produksi dengan mempekerjakan banyaknya pekerja sebagai manajemen produksi yang mampu menghasilkan lebih banyak produk (M.L. Jhingan, 2016).

Upah minimum Kabupaten Sidoarjo terus mendapati kenaikan dari tahun ke tahun, perihal itu sudah diselaraskan pada pemerintah antara kenaikan upah minimum dengan pengeluaran masyarakat. Dalam hal ini keduanya harus sama-sama mensejahterakan antara tenaga kerja dan perusahaan. Jika dilihat pada jumlah penganggurannya yang naik di Kabupaten Sidoarjo dapat menjadi pertanyaan apakah dengan adanya kenaikan upah mampu mensejahterakan hidup tenaga kerja. Hal tersebut dapat disinggung dalam hasil riset yang dikerjakan Wildan, 2018 dimana upah minimum kabupaten mempunyai hubungan positif pada tenaga kerja yang diserap.

Dari latar belakang permasalahan yang sudah dijelaskan diatas bertujuan dalam mengetahui dan menganalisa apakah pertumbuhan ekonomi, investasi domestik, dan upah minimum Kabupaten berpengaruh terhadap penyerapan tenaga kerja di Kabupaten Sidoarjo, maka peneliti mengangkat judul mengenai ***“ANALISIS PENGARUH PERTUMBUHAN EKONOMI, PENANAMAN MODAL DALAM NEGERI, DAN UPAH MINIMUM TERHADAP PENYERAPAN TENAGA KERJA DI KABUPATEN SIDOARJO”***.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasar pada penjelasan latar belakang, maka masalah pada riset ini telah diformulasikan sebagai berikut :

- a. Apakah pertumbuhan ekonomi berpengaruh terhadap penyerapan tenaga kerja di Kabupaten Sidoarjo ?
- b. Apakah penanaman modal dalam negeri berpengaruh terhadap penyerapan tenaga kerja di Kabupaten Sidoarjo ?
- c. Apakah upah minimum berpengaruh terhadap penyerapan tenaga kerja di Kabupaten Sidoarjo ?

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasar rumusan masalah tersebut, maka riset ini mempunyai tujuan pada beberapa perihal :

- a. Untuk menganalisis pengaruh pertumbuhan ekonomi terhadap penyerapan tenaga kerja di Kabupaten Sidoarjo.
- b. Untuk menganalisis pengaruh penanaman modal dalam negeri terhadap penyerapan tenaga kerja di Kabupaten Sidoarjo.
- c. Untuk menganalisis pengaruh upah minimum terhadap penyerapan tenaga kerja di Kabupaten Sidoarjo.

1.4 Ruang Lingkup Penelitian

Ruang lingkup riset ini disusun memakai pendekatan kuantitatif dengan data sekunder pada Kabupaten Sidoarjo. Data diperoleh peneliti melalui website resmi Badan Pengelola Statistik Provinsi Jawa Timur, Badan Pengelolaan Statistik Kabupaten Sidoarjo. Serta didapatkan melalui website resmi Kabupaten Sidoarjo, NSWI (*National Single Window for Investment*) dan Dinas

Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Sidoarjo. Ruang lingkup riset ini menganalisa permasalahan penyerapan tenaga kerja dengan progress yang meningkat terhadap masalah ketenagakerjaan dan faktor internal didalamnya yang telah ditetapkan oleh peneliti.

1.5 Manfaat Penelitian

Mengacu pada tujuan riset, maka riset ini diharap mampu memberikan kebermanfaat secara langsung maupun tidak langsung:

a. Bagi Pemerintah Daerah

Penelitian ini diharap bisa memberi informasi dan bahan tinjauan bagi pemerintah daerah Kabupaten Sidoarjo terkait permasalahan penyerapan tenaga kerja dimana pembangunan ekonomi regional di Kabupaten Sidoarjo dalam progres peningkatan jumlah lapangan kerja. Pemerintah daerah Kabupaten Sidoarjo diharapkan dapat mendorong penanaman modal dalam negeri dengan pembangunan infrastruktur untuk penyediaan lapangan kerja dalam program padat karya yang tujuannya menopang perekonomian di Kabupaten Sidoarjo.

b. Bagi Universitas

Penelitian ini diharap mampu memberi hasil pemikiran output tambahan ilmu yang sejalan dengan permasalahan terkait ketenagakerjaan dan juga variabel yang dibutuhkan seperti pertumbuhan ekonomi, penanaman modal dalam negeri, dan upah minimum terhadap penyerapan tenaga kerja di Kabupaten Sidoarjo pada pandangan Ilmu Ekonomi Pembangunan.

c. Bagi Peneliti

Penelitian ini diharap mampu memberi peranana penting bagi perluasan ilmu pengetahuan dan bisa digunakan sebagai referensi riset kelanjutan terkait permasalahan ketenagakerjaan sebagai pendalaman lebih lanjut pada analisisnya, serta dapat dikembangkan menjadi kebaruan lebih lanjut.